

ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) DI DESA BULIE, KECEMATAN SIBULUE, KABUPATEN BONE

Nasrul¹, Muhammad Yamin², Muhammad Ardi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone¹²³

Email: nasrulbone394@gmail.com¹, husfahmaipal@gmail.com², ardi6594@gmail.com³

Abstract

This study aims to determine whether the Village Government of Bulie has implemented accounting standards in presenting its village financial reports. The research methodology used is qualitative research. The data sources include primary data obtained through direct interviews with the village secretary of Bulie and secondary data derived from relevant documents. The research location is in Bulie Village, Sibulue Subdistrict, Bone Regency. The findings indicate that the financial reporting in Bulie Village is not yet fully aligned with or does not entirely meet several principles of the Government Accounting Standards (SAP). The village government currently prepares only two types of financial reports, while to comply with SAP, seven types of financial statements are required, namely the Budget Realization Report (LRA), the Statement of Changes in Budget Surplus (LPSAL), the Balance Sheet (LN), the Statement of Changes in Equity (LPE), the Operational Report (LO), the Cash Flow Statement (LAK), and the Notes to the Financial Statements (CALK). Based on these findings, it is recommended that the Village Government of Bulie regularly conducts outreach, education, and training for village officials to enhance their understanding of the alignment and regulations related to financial management in accordance with the Government Accounting Standards (SAP).

Keywords: *Relevance, Government Accounting Standards (SAP), Village Government of Bulie.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam menyajikan laporan keuangan desa, Pemerintah Desa Bulie sudah menerapkan standar akuntansi dalam pelaporan keuangan desa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan sekretaris desa bulie sedangkan data skunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Bulie Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan di Desa Bulie, belum relevan atau belum memenuhi beberapa prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sebagaimana pemerintah Desa Bulie hanya membuat dua jenis laporan keuangan, untuk membuat laporan keuangan Desa yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memerlukan tujuh jenis laporan keuangan diantaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Neraca (LN), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah Desa Bulie diharapkan sering mengadakan sosialisasi, pendidikan serta pelatihan kepada aparatur Desa terkait keselarasan dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar bisa lebih memahami tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kata Kunci: *Relevansi, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemerintah Desa Bulie.*

PENDAHULUAN

Desa Bulie memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dengan kewenangan mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat. Untuk mendukung peningkatan pembangunan, diperlukan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07, yang mengatur perlakuan akuntansi terhadap aset tetap, mencakup pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan. Laporan keuangan desa menjadi hasil akhir dari proses pencatatan keuangan yang dilakukan oleh aparatur desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Fitriyani et al., 2023).

Akuntansi pemerintah menjadi sangat penting seiring meningkatnya tuntutan dari berbagai pihak untuk akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan transaksi serta pelaporan kinerja pemerintah. Mulai dari pengelolaan keuangan di tingkat lokal, regional, hingga nasional, akuntansi pemerintah berperan dalam mendukung tata kelola keuangan publik yang efisien dan transparan (Ruspiana & Nafsiah, 2025). Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk desa juga diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang mengedepankan akuntabilitas dan keterbukaan. Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat harus menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya dengan menerapkan standar akuntansi yang sesuai. Laporan tersebut menjadi bukti pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis untuk mengoptimalkan pembangunan desa (Amelia, 2022). Sistem pelaporan yang baik memungkinkan pengawasan arus kas, pengelolaan aset tetap, dan penyaluran anggaran yang efektif sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus menilai kinerja pemerintah desa dan mendukung perencanaan jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai tata kelola keuangan desa sesuai standar yang berlaku sangat diperlukan agar Desa Bulie dapat mengelola sumber daya secara efisien dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Kesejahteraan desa sangat bergantung pada pengelolaan keuangan yang baik, yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk menilai kemampuan anggaran desa dalam membiayai belanja serta memastikan dana publik digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penyusunan laporan keuangan desa harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, guna mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Damayanti et al., 2022).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan langkah strategis dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Dona & Lestari, 2020). Dengan demikian, pemerintah desa Bulie dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan keuangan, yang selanjutnya mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan serta memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk kemajuan bersama. Namun, seringkali realisasi anggaran lebih rendah dari yang direncanakan akibat penyerapan dana yang tidak efisien atau kinerja pemerintah desa yang kurang optimal, misalnya program yang tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, berbagai masalah seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan pengelolaan anggaran yang tidak

tepat masih menjadi kendala yang menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan public (Novelinda et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan untuk memastikan akuntabilitas dan tata kelola anggaran yang baik di Desa Bulie. Pengawasan yang memadai diharapkan dapat mencegah praktik penyimpangan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaporan keuangan di Desa Bulie telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dengan fokus pada aspek akurasi, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kendala serta tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAP dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelaporan tersebut. Manfaat penelitian ini mencakup sebagai panduan dalam menilai tingkat kesesuaian pelaporan keuangan desa dengan SAP serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi aparatur desa guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar yang berlaku.

Memahami pentingnya desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), penelitian ini berfokus pada analisis pelaporan keuangan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

A. Konsep Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan proses pelaporan keuangan. Laporan ini biasanya mencakup beberapa elemen utama, seperti neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam bentuk laporan arus kas atau laporan arus dana. Selain itu, laporan keuangan juga meliputi catatan dan dokumen pendukung lainnya, termasuk jadwal realisasi, informasi keuangan berdasarkan segmen industri dan wilayah geografis, serta pengungkapan dampak dari perubahan harga (Siregar et al., 2021).

B. Sumber Hukum Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran Ditinjau dari Al-qur'an

Pengelolaan keuangan desa dalam Islam memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an yang menekankan kejujuran, transparansi, serta amanah dalam mengelola harta publik. Beberapa ayat yang relevan antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَتَخَسَّ مِنْهُ شَيْئًا فَلَنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُؤْمَلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَلَنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ

اخذها الأخرى ولا ياب الشهود إذا ما دُعوا ولا تسمعوا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجلٍ ذلكم أفسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا
تتابعوا إلا أن تكون تجارة خاضرة تدبرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإِنَّه
فُسُوقٌ بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. Al-Baqarah [2]:282

Ayat ini mengajarkan bahwa pentingnya prinsip amanah dalam pengelolaan dana publik, termasuk dalam mengelola keuangan desa, agar tidak disalahgunakan

2. Laporan Keuangan Ditinjau dari Hadist

a. Hadist tentang Amanah

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap pemimpin, termasuk dalam pengelolaan anggaran desa, memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dana publik secara amanah. (HR Bukhari Dan Muslim)

b. Hadist tentang transparansi

"Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami."
(HR. Muslim)

Hadis ini mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan agar tidak ada unsur penipuan atau penyimpangan.

C. Prinsip Dasar dalam Pelaporan Keuangan

Prinsip kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan mengharuskan informasi yang disajikan bersifat objektif, adil, dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan auditor, dalam pengambilan keputusan yang tepat. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam pelaporan sebagai berikut: (1)Objektivitas berarti bahwa seluruh data yang disajikan harus berbasis pada fakta yang dapat diverifikasi serta bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok, sedangkan kewajaran menuntut transparansi informasi agar seluruh pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan anggaran desa. (2)Keandalan laporan keuangan juga menjadi aspek penting, di mana informasi harus akurat, dapat dipercaya, dan tidak menyimpang dari kenyataan agar tidak menimbulkan kesalahan kebijakan atau menurunkan kepercayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah RI, 2005). (3)Merujuk pada PSAP Nomor 02, laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik: relevan, mudah dipahami, dapat diverifikasi, dan netral (BPK, 2010). (4)Selain itu, PSAP 2025 menegaskan bahwa penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) wajib mengikuti prinsip akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan laporan keuangan yang memenuhi unsur: mudah dipahami, relevan, handal, dan dapat dibandingkan, guna menjamin transparansi serta akurasi informasi dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan desa.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

a. Definisi Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan seperangkat prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. SAP pertama kali diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 dan diperbarui dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, serta kini disempurnakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 2025. Dalam PSAP 2025, SAP didefinisikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP memiliki kekuatan hukum sebagai standar pertama yang secara khusus mengatur praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia, dengan fungsi utama sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Standar ini juga berperan penting dalam menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor laporan keuangan. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP, di mana pengguna seperti legislatif memanfaatkannya untuk memahami informasi yang disampaikan, sementara auditor eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggunakannya sebagai dasar evaluasi dalam proses audit (Ariawan et al., 2019).

b. Definisi Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah adalah Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan

ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan (Trisnawati, 2019).

c. Tujuan Akuntansi Pemerintah

Tujuan akuntansi pemerintahan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama: (1) Pertanggungjawaban, yaitu menyediakan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasi unit-unit pemerintah; (2) Manajerial, yang berarti akuntansi pemerintahan harus mendukung proses perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan program, pemantauan dan pengendalian anggaran, pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan (3) Pengawasan, yaitu memastikan tersedianya informasi yang memadai untuk memungkinkan aparat pengawasan fungsional melaksanakan pemeriksaan secara efektif dan efisien terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah (Fitri et al., 2023).

METODE

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi kesesuaian pelaporan Keuangan Desa Bulie dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Septiani & Wardana, 2022) dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif studi dokumen (*document study*) yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai dokumen guna memahami suatu fenomena atau kejadian (Waruwu, 2022). Data pada penelitian ini menggunakan dua jenis data: (1) data primer yang didapatkan dari narasumber melalui wawancara, dan (2) data sekunder yang didapatkan penelitian dari sumber lain, seperti dokumentasi, laporan serta sebagainya. Subjek yang berupa informan peneliti adalah pelaporan keuangan Desa yang ada di kantor Desa Bulie dengan objek penelitian ini adalah Kepala desa ataupun Aparat Desa Bulie yang membuat laporan keuangan Desa. Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan terarah (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023). Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Selanjutnya, teknik triangulasi data adalah metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan melalui pemanfaatan berbagai sumber, metode, atau perspektif (Saadah et al., 2022). Dalam konteks pelaporan keuangan dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), triangulasi data memperkaya analisis dan memastikan akurasi informasi. Salah satu bentuknya adalah triangulasi teori, yaitu penggunaan berbagai perspektif seperti teori akuntansi sektor publik, teori implementasi kebijakan, dan teori manajemen perubahan untuk menafsirkan data secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang. Adapun teknik analisis data terdiri atas tiga tahapan, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis penyajian laporan keuangan Desa Bulie Tahun Anggaran 2024 merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan Pasal 2, rincian perubahan anggaran tersebut tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian integral dari peraturan. Selanjutnya, Pasal 3 menyatakan bahwa pelaksanaan dari perubahan anggaran ini diwujudkan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran. Sementara itu, Pasal 4 menetapkan bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan harus diumumkan dalam Berita Desa Bulie agar diketahui publik. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Bulie tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DESA BULIE TAHUN 2024

Tabel 1
Pendapatan Desa

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Desa (PAD)	0,-	0,-	0,-	0,-
Transfer	1.143.278.000,-	1.144.326.900,-	1.048.900,-	1.144.942.259,-
Lain-lain Pendapatan	200.000,-	650.000,-	450.000,-	650.000,-
Jumlah	1.143.478.000,-	1.144.976.900,-	1.498.900,-	1.145.592.259,-

Tabel 2
Belanja Desa

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Penyelenggaraan Pemerintahan	449.813.623,-	451.312.523,-	1.498.900,-	402.952.005,-
Pelaksanaan Pembangunan	660.107.000,-	660.107.000,-	0,-	660.107.000,-
Pembinaan Kemasyarakatan	17.100.000,-	17.100.000,-	0,-	12.300.000,-
Pemberdayaan Masyarakat	0,-	0,-	0,-	0,-
Penanggulangan Bencana	21.600.000,-	21.600.000,-	0,-	21.600.000,-
Jumlah	1.148.620.623,-	1.150.119.523,-	1.498.900,-	1.096.959.005,-

Tabel 3
Surplus / (Defisit)

Keterangan	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Surplus/(Defisit)	Rp (5.142.623,-)	Rp 48.633.254,-

Tabel 4

Pembiayaan Desa

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	5.142.623,-	5.142.623,-	0,-	5.142.623,-
Pengeluaran Pembiayaan	0,-	0,-	0,-	0,-
Selisih Pembiayaan	5.142.623,-	5.142.623,-	0,-	5.142.623,-

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL) DESA BULIE
TAHUN 2024

Tabel 5
Pendapatan

Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Menjadi (Rp)	Selisih (Rp)
1. Pendapatan Asli Desa	0,-	0,-	0,-
2. Pendapatan Transfer	1.143.278.000,-	1.144.326.900,-	1.048.900,-
a. Dana Desa	702.707.000,-	702.707.000,-	0,-
b. Bagi Hasil Pajak/Retribusi	26.536.000,-	27.376.000,-	840.000,-
c. Alokasi Dana Desa	414.035.000,-	414.243.000,-	208.000,-
3. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	200.000,-	650.000,-	450.000,-
Jumlah Pendapatan	1.143.478.000,-	1.144.976.900,-	1.498.900,-

Tabel 6
Belanja

Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Menjadi (Rp)	Selisih (Rp)
1. Belanja Operasi			
a. Belanja Pegawai	345.582.000,-	345.582.000,-	0,-
b. Belanja Barang dan Jasa	312.962.223,-	309.461.123,-	(3.501.100,-)
c. Belanja Tidak Terduga	26.600.000,-	26.600.000,-	0,-
2. Belanja Modal	463.476.400,-	467.976.400,-	4.500.000,-
Jumlah Belanja	1.148.620.623,-	1.150.119.523,-	1.498.900,-

Tabel 7
Surplus / (Defisit)

Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Menjadi (Rp)	Selisih (Rp)
Surplus / (Defisit)	(5.142.623,-)	(5.142.623,-)	0,-

Tabel 8
Pembiayaan

Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Menjadi (Rp)	Selisih (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	5.142.623,-	5.142.623,-	0,-
a. SILPA Tahun Sebelumnya	5.142.623,-	5.142.623,-	0,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	0,-	0,-	0,-
Pembiayaan Netto	5.142.623,-	5.142.623,-	0,-

Tabel 9
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Menjadi (Rp)	Selisih (Rp)
SILPA / SIKPA	0,-	0,-	0,-

Menurut Responden R.L, Desa Bulie memiliki sejumlah aset strategis yang berpotensi menjadi sumber pendapatan berkelanjutan, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berperan dalam menambah pendapatan melalui pengelolaan berbagai unit usaha. BUMDes dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa apabila dikelola secara profesional. Pendapatan dari aset desa, termasuk hasil usaha BUMDes, umumnya dialokasikan untuk peningkatan fasilitas kantor desa, pengadaan perlengkapan administrasi, dan penambahan modal usaha guna memperkuat daya saing. Dalam hal pengelolaan keuangan, tanggung jawab utama berada pada Sekretaris dan Bendahara Desa, namun pelaporan keuangan tetap melibatkan pihak ketiga yang ahli di bidang akuntansi karena aparatur desa belum memiliki kompetensi teknis yang memadai. Meskipun pelatihan telah dilakukan, frekuensinya yang rendah (hanya dua atau tiga tahun sekali) belum mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara optimal. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan yang membutuhkan ketelitian, pemahaman akuntansi, dan keahlian khusus.

Dalam hal prosedur pertanggungjawaban keuangan, Pemerintah Desa Bulie telah menjalankan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku, di mana setiap bulan Sekretaris Desa menyampaikan laporan kepada Bendahara Desa mengenai seluruh transaksi keuangan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa. Menurut Responden R.L, penyusunan laporan keuangan masih melibatkan tenaga profesional dari luar desa akibat keterbatasan kapasitas aparatur dalam memenuhi standar pelaporan. Laporan keuangan yang disusun

mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL), namun penyusunannya kerap dilakukan setelah seluruh anggaran direalisasikan, baik untuk pembangunan fisik maupun operasional desa. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar pelaporan keuangan dapat dilaksanakan secara akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Kesesuaian Laporan Keuangan Desa Bulie Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Desa Bulie pada tahun 2024 hanya mencakup dua jenis laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL). Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pelaporan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi standar SAP, Desa Bulie seharusnya menyusun tujuh jenis laporan keuangan, dengan lima di antaranya sebagai berikut:

LAPORAN NERACA KEUANGAN DESA BULIE TAHUN 2024

Tabel 10

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)
ASET	
Aset Lancar	
- Kas di Bendahara Desa	12.500.000,-
- Piutang	0,-
Jumlah Aset Lancar	12.500.000,-
Aset Tetap	
- Tanah	150.000.000,-
- Gedung dan Bangunan	400.000.000,-
- Peralatan dan Mesin	100.000.000,-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	300.000.000,-
- Aset Tetap Lainnya	50.000.000,-
Jumlah Aset Tetap	1.000.000.000,-
JUMLAH ASET	1.012.500.000,-
KEWAJIBAN	
- Utang Pihak Ketiga	0,-
JUMLAH KEWAJIBAN	0,-
EKUITAS DANA DESA	
- Ekuitas Awal	900.000.000,-
- Surplus/Defisit Tahun Berjalan	112.500.000,-
JUMLAH EKUITAS DANA DESA	1.012.500.000,-
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	1.012.500.000,-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DESA BULIE

Tabel 11

Uraian	Jumlah (Rp)
Ekuitas Awal	900.000.000,-
Surplus/Defisit LRA	112.500.000,-

Koreksi Ekuitas	-
Ekuitas Akhir	1.012.500.000,-

LAPORAN OPERASIONAL DESA BULIE TAHUN 2024**Tabel 12**

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan LO	2.012.500.000,-
Pendapatan Asli Desa	50.000.000,-
Transfer	1.962.500.000,-
Beban Operasional	1.900.000.000,-
Beban Pegawai	300.000.000,-
Beban Barang dan Jasa	600.000.000,-
Beban Hibah	200.000.000,-
Beban Modal	800.000.000,-
Surplus/Defisit LO	112.500.000,-

LAPORAN ARUS KAS DESA BULIE TAHUN 2024**Tabel 13**

Uraian	Jumlah (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasional	112.500.000,-
Penerimaan dari Pendapatan	2.012.500.000,-
Pembayaran Belanja	(1.900.000.000),-
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	-
Perolehan Aset Tetap	-
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	-
Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan Netto	-
Kenaikan Kas Neto	112.500.000,-
Kas Awal Tahun	-
Kas Akhir Tahun	12.500.000,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) DESA BULIE 2024**a) Dasar Penyajian**

Laporan ini disusun berdasarkan SAP berbasis kas menuju akrual, menggunakan satuan rupiah penuh.

1. Kebijakan Akuntansi Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan.
2. Tidak ada kewajiban pihak ketiga pada akhir periode.
3. Surplus dari LRA menjadi penambah ekuitas dana desa.

Tabel 14
Rincian Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai (Rp)
Tanah	150.000.000,-
Gedung dan Bangunan	400.000.000,-
Peralatan dan Mesin	100.000.000,-
Jalan, Irigasi, Jaringan	300.000.000,-

Aset Tetap Lainnya

50.000.000,-

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah analisis pelaporan keuangan Desa Bulie berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan di Desa Bulie mengenai Standar akuntansi pemerintah tentang laporan keuangan Desa Bulie yang belum sesuai serta prosedur pemerintah Desa Bulie dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Dimana dalam laporan tersebut yang diperoleh dari informan bahwa dalam pelaporan keuangan Dsa Bulie belum terlatih ataupun memenuhi dengan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Komponen-komponen laporan keuangan, yang disajikan oleh pemerintah Desa Bulie diantaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Sehingga memerlukan lima tambahan jenis laporan keuangan, agar bisa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

b) Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Bulie Terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Desa Bulie telah disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat (Fitriyani et al., 2023) yang menyatakan bahwa penerapan SAP dalam laporan keuangan desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, seperti pengakuan dan pengukuran aset tetap.

c) Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terkait Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Dalam kajian ini, terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hariatih & Sukardi, 2021) yang juga menemukan bahwa pelaporan keuangan desa belum sepenuhnya relevan atau sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Namun, penelitian ini berbeda dalam hal fokus, di mana penelitian ini lebih menekankan pada evaluasi kualitas laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sedangkan penelitian Hariatih dan Sukardi lebih pada prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan.

d) Teori dan Pendapat Terkait Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Teori akuntansi pemerintah yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan SAP di Desa Bulie dapat meningkatkan akuntabilitas aparatur desa. Selain itu, penelitian ini juga mendukung pendapat Siti Ameliayang menyatakan bahwa laporan keuangan yang baik harus memiliki karakteristik relevansi, mudah dipahami, dan dapat diverifikasi (Amelia, 2022).

e) Kendala dalam Pelaporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Meskipun terdapat kemajuan dalam pelaporan keuangan, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Bulie, seperti kurangnya pemahaman aparatur Desa mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam akuntansi. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rachman et al. (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan desa (Rachman et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan pelaporan keuangan di Desa Bulie, belum relevan atau belum memenuhi beberapa prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sebagaimana pemerintah Desa Bulie hanya membuat dua jenis laporan keuangan, untuk membuat laporan keuangan Desa yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memerlukan tujuh jenis laporan keuangan diantaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Neraca (LN), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Oprasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S. (2022). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 5(1), 76–84.
- Ariawan, I. G., Dewi, P. I. S., Artisya, K., & Intan, D. P. (2019). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1), 43–47. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19851>
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Damayanti, F., Ariadi, D., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analysis of SAP Implementation No 1 Concerning Presentation of Financial Statements in Gresik District Government. *Proceedings of International Conference on Economics Business and Government Challenges*, 5(1), 253–257.
- Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 135. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2877>
- Fitri, S. A., Putri, Y. R., Zulfina, Y., Fandra, J., Marisa, F., Safitri, A., Husnah, H., Adilah, Y., Husna, I. A., & Ariadi, R. (2023). *Akuntansi Pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Fitriyani, Y., Zein, M., & Jevry, J. (2023). Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Desa Dengan Metode Akrua Pada Kantor Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Periode 2017-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.34128/jra.v6i1.128>
- Hariatih, & Sukardi. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Pelaporan Pertanggung jawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Study di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima). *Jurnal PenKomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 4(1), 47–59.
- Novelinda, S., Sholehah, I., Lusiana, R., & Mutiara, N. (2024). Pengawasan realisasi dana desa pada desa cendono, kecamatan kandat, kabupaten kediri tahun 2023. *AKSIME: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi*, 1(3), 1–14. <https://doi.org/10.32503/aksime.v1i3.5444>
- Peraturan Pemerintah RI. (2005). Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah No. 02. In *PSAP O2 tentang Laporan Realisasi Anggaran* (Issue 07).
- Rachman, D., Sofwan, S. V., & Amelia, S. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Survei Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Arjasari). *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, 14(02), 134–150.
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34–46.
- Ruspiana, M., & Nafsiah, S. N. (2025). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDESA) Pada Kantor Desa Cempaka Sakti. *Urnal Media Wahana Ekonomika*, 21(4), 632–645.

- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64.
- Septiani, R. A. D., & Wardana, D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda*, V(2), 130–137.
- Siregar, M. I., Saggaf, A., & Hidayat, M. (2021). *Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Berbasis Microsoft Excel Pada Kerajinan Songket Mayang Palembang*.
- Trisnawati, N. (2019). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Berbasis Akrual Di Indonesia. *Manajemen & Bisnis Jurnal*, 5(2), 58–65. <https://doi.org/10.37303/embeji.v5i2.90>
- Waruwu, M. (2022). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>